

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. (2003). *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Inddonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Benenson, P. (2010). *Becoming A Human Rights Friendly School: A Guidance for School Around the World*. London: Amnesty International Ltd.
- Bapenas. (2005). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005 – 2009*. Jakarta: Departemen Kesehatan.
- BPHN. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- D Brent Ruben, L. P. S. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia, Y. L. B. H. (2001). *Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, M. (2017). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- LIPI. (2015). *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X*. Jakarta: LIPI.
- Lubis, S. K. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, B. (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press.

- Pawito. (2008). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Putro, W. D. (2020). *Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pelangi Aksara.
- Sharp. (2010). *Economics of Sosial Issues*. Chicago: D. Irwin.
- Soekanto, S. (1977). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penetapan Metode Yuridis - Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas)*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soekirman. (2013). *Situational Analysis of Nutrition Problems in Indonesia: Its Policy, Programs and Prospective Development*. Jakarta: UNDP.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat. (2007). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syam, N. W. (2011). *Psikologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Verdiansyah, D. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi, Pendekatan Taksonomi Konseptual*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Yudisial, K. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

B. Jurnal dan Makalah

- Alarid, L. F. & C. D. M. (2012). *Implementing Restorative Justice In Police Departments, Police Practice and Research*. Journal University of Texas at El Paso, 4(1).

- Angga, R. A. (2018). *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum, 4(2).
- Asmuni. (2014). *Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*. Al- Mawarid, XXII(1).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara* (Makalah pada acara Lokakarya Nasional Komnas Perempuan). Jakarta.
- Baital, B. (2016). *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 3(2).
- Banerjee, A. (2018). *Tangible Information and Citizen Empowerment- Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia*. Journal of Political Economy, 126(2).
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). *Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People*. Jurnal Konstitusi, 15(1), 50.
- Kania, D. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 12(4).
- Moefad, A. M. (2007). *Perilaku Individu Dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social*. Jombang: El-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA.
- Morissan. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Mare.
- Muhammad, A. (1995). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nashriana. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurudin, A. (2003). *Revitalisasi Keberpihakkan Profesi Advokat terhadap Klien yang Tidak Mampu*. Makalah, (29), 1–7.

Putri, R. S. C. (2020). *Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates Di Denpasar Bali*. Ilmu Komunisi Pembangunan, 4(1), 1–15.

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex Scientia Law Review, 2(2).

Suseswo, F. A. (2019). *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Taufik, L. M. (2017). *Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan, 5(3).

D. Data Internet

Kemenkumham. (2018). Urgensi Harmonisasi Perda. Retrieved from <https://sumut.kemenkumham.go.id/Berita-Kanwil/Berita-Utama/2922-Urgensi-Harmonisasi-Perda>

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

